Pelatihan *Assessment* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Assessment Training of the Regional Revenue Agency of Berau Regency

Djupiansyah Ganie^{1*}, Muhammad Bayu², Darmono³, Nahwani Fadelan⁴, Sayugo Adi Purwanto⁵, Siti Munawaroh⁶, Hasbiah⁷

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

⁷STAI DDI PANGKEP, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Korespondensi penulis: siti010890@gmail.com

Article History:

Received: Februari 14, 2021

Revised: Februari 28, 2021

Accepted: Maret 17, 2025

Published: Maret 31, 2025

Keywords: *Assessment, Employee Performance, Bapenda, Human Resource Development*

Abstract: *The Assessment Training conducted by the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Berau Regency is a strategic effort aimed at enhancing the competency of civil servants in objectively and systematically evaluating employee performance. This training was designed to provide participants with a solid understanding of basic assessment concepts, techniques for developing performance indicators, and the practical application of evaluation methods relevant to their respective roles and responsibilities. The training methods included lectures, interactive discussions, and hands-on simulations in assessment design and implementation. The results of the training indicate improved participant understanding of the importance of performance assessment as a basis for managerial decision-making, employee development, and organizational capacity building. This initiative is expected to contribute to the creation of a more professional, transparent, and accountable system for managing regional revenue through improved human resource quality within Bapenda Berau.*

Abstrak

Pelatihan *Assessment* yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur dalam menilai dan mengevaluasi kinerja pegawai secara objektif dan terstruktur. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman mengenai konsep dasar *assessment*, teknik penyusunan indikator penilaian, serta penerapan metode evaluasi kinerja yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Metode pelatihan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta simulasi praktik langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan *assessment*. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya penilaian kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, pembinaan pegawai, serta pengembangan kapasitas organisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pendapatan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda Kabupaten Berau.

Kata kunci: *Assessment, Kinerja Pegawai, Bapenda, Pengembangan SDM*

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan luas bagi daerah melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah, dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak

daerah dan Retribusi daerah. Kabupaten Berau memiliki potensi besar berupa sumber daya alam yang melimpah yang dapat mendukung daerah untuk tumbuh secara inklusif dan lestari. Secara khusus, Kabupaten Berau memiliki beragam potensi pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan hasil kelautan serta perikanan. Lokasi Kabupaten Berau yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi peluang strategis dalam pembangunan daerah di masa mendatang. Namun demikian, peluang ini hadir bersamaan dengan tantangan pembangunan daerah yang cukup serius khususnya pada aspek geografis serta tantangan kemajuan teknologi berpotensi mengancam jika tidak diimbangi dengan Sumber daya manusia yang handal dibidang pendapatan. Daerah harus bisa mandiri agar dapat berkembang, untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang ada melalui penguatan kapasitas fiskal.

Program Evaluasi 2024 dan rencana kerja tahun 2025 secara khusus juga membidik pentingnya penyusunan perencanaan kerja agar lebih terarah, terutama bagaimana respons terhadap UU HKPD, yang kemudian diikuti lahirnya PP 35/2023 serta Perda Nomor 7 Tahun 2023. Ragam regulasi tersebut tentunya membawa tantangan dan peluang tersendiri dalam pertumbuhan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Berau. Oleh karenanya, perlu adanya pengaturan, aspek manajemen, hingga proses bisnis. Bersamaan dengan penyusunan tersebut, hal lain yang perlu didorong adalah penguatan internal dan kerjasam tim Bapenda sendiri. Hal ini dilakukan agar penentuan hal strategis baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi dilakukan dalam koridor basis data dan informasi yang kuat.

Penyusunan rencana kerja merupakan elemen penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau, sebagai institusi yang berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah, membutuhkan perencanaan kerja yang matang untuk mendukung pencapaian target pendapatan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pegawai Bapenda dalam menyusun rencana kerja yang sistematis dan berbasis data.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau memiliki peran krusial dalam mengelola keuangan daerah dan memastikan ketersediaan dana untuk pembangunan. Kinerja optimal Bapenda sangat bergantung pada perencanaan kerja yang matang dari setiap pegawai. Namun, seringkali ditemui beberapa tantangan dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan Bapenda, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep perencanaan kerja yang efektif dan efisien, minimnya pelatihan yang spesifik untuk meningkatkan kemampuan penyusunan rencana kerja, kurangnya integrasi antara rencana kerja individu dengan tujuan strategis organisasi, adanya hambatan dalam implementasi rencana kerja akibat faktor internal maupun eksternal. Jika tidak segera diatasi, tantangan-tantangan tersebut dapat berdampak negatif,

seperti penurunan produktivitas pegawai, tidak tercapainya target pendapatan daerah, terjadinya pemborosan sumber daya, kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

2. KAJIAN TEORITIS

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi tonggak reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Teori desentralisasi fiskal menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada daerah akan mendorong peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, mendorong akuntabilitas fiskal, dan memperkuat kapasitas keuangan daerah (Musgrave, 1959; Oates, 1972). Dalam konteks ini, UU HKPD memberikan ruang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Berau, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, yang kemudian diperkuat melalui PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Perda Nomor 7 Tahun 2023.

Konsep pembangunan inklusif dan berkelanjutan menekankan pentingnya pemanfaatan potensi daerah yang merata dan berwawasan lingkungan. Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor internal seperti sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam pembangunan daerah (Romer, 1986). Kabupaten Berau memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, kelautan, perkebunan, dan pariwisata, yang dapat menjadi sumber pertumbuhan PAD bila dikelola secara strategis. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan geografis.

Dalam teori manajemen strategis, perencanaan kerja merupakan proses penting untuk menetapkan arah, sasaran, serta alokasi sumber daya organisasi secara efisien dan efektif (Bryson, 2011). Perencanaan kerja yang berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terukur. Dalam lingkup organisasi publik seperti Bapenda, perencanaan kerja harus selaras dengan visi misi organisasi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta capaian target-target kinerja (Keban, 2004). Kurangnya pemahaman terhadap perencanaan kerja dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara program dan hasil, pemborosan anggaran, serta menurunnya akuntabilitas.

Teori kapasitas kelembagaan menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal (*internal capacity*), termasuk sumber daya manusia, struktur organisasi, dan proses kerja (Grindle & Hilderbrand, 1995). Oleh karena itu, pelatihan penyusunan rencana kerja serta penguatan koordinasi tim menjadi kebutuhan mutlak.

Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga membentuk budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif di lingkungan Bapenda.

Konsep manajemen berbasis data (*data-driven management*) menekankan bahwa pengambilan keputusan organisasi harus didasarkan pada data dan informasi yang valid, bukan hanya intuisi atau kebiasaan (Provost & Fawcett, 2013). Dengan implementasi sistem informasi yang baik, Bapenda dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan perencanaan secara lebih akurat dan responsif terhadap dinamika perubahan, baik internal maupun eksternal.

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan pelatihan *assessment* Evaluasi 2024 dan rencana kerja tahun 2025 Bapenda Kabupaten Berau. Assesmen yang dilakukan mencakup Lima aspek tata kelola yaitu Kapasitas Organisasi; Kinerja Manajemen; Kinerja Keuangan; Proses Bisnis; dan Dampak Sosial dan Lingkungan. Bentuk kegiatan dari penelitian ini adalah ceramah, diskusi, simulasi, dan studi kasus.

Melihat kondisi tersebut, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan fokus pada penyusunan rencana kerja pegawai Bapenda Kabupaten Berau menjadi sangat urgen. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam menyusun rencana kerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), membangun budaya perencanaan yang kuat di lingkungan Bapenda, menyinkronkan rencana kerja individu dengan tujuan strategis organisasi, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai.

Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan akan diperoleh manfaat, seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2025, bertempat di ruang rapat RPJMD Bapelitbang Kab. Berau. Peserta kegiatan merupakan seluruh pejabat, staff, dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupate Berau. Detail peserta kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Peserta Kegiatan

No.	N a m a	Jabatan
1	Dr. H. Djupiansyah Ganie, S.E, M.Si.	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	H. Iriansyah, S.E	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3	Hj. Sri Wahyu Suprihatin, S.Sos	Kabid Penagihan & Pembukuan
4	Hj. Harlina, S.H, M.E.	Kabid Perencanaan & Pengendalian Operasional
5	Marhat, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Muda
6	Rusli, S.E	Kabid Penerimaan Bukan Pajak Daerah
7	Lisdiana, S.E, M.E.	Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda
8	Muhammad Attar, S.E	Kabid. Pendaftaran & Penetapan
9	Janwaril Adhatulahad, S.Sos	Kasubbid. Retribusi
10	Syahrial, S.IP	Kasubbid. Perencanaan Pendapatan
11	Evy Purwaning Kusumastuti, S.E	Kasubbid. Pengendalian & Pelaporan
12	Agus Rizali, S.E	Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda
13	Exdu Zzuman J, S.E	Kasubbid. Pendataan & Pendaftaran
14	Fitriady, S.STP	Kasubbid. Pemeriksaan & Keberatan
15	Jauhariyah, S.E, M.Si	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
16	Rinto Petronius	Kasubbid. Pendapatan Daerah Lainnya
17	Ratna Rara Toding, S.E	Kasubbid. Penagihan
18	Sulkifli, S.E	Kasubbid. Perhitungan dan Penilaian
19	Leni Supriani, S.E, M.E	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
20	Tedy Haryadi, S.E, M.E	Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda
21	Nurul Sa'dah, S.E	Bendahara Penerimaan
22	Samsul Edeson, S.E	Pengelola Barang Milik Negara
23	Heri Ismi Nooryanto, S.E	Pengadministrasi Kepegawaian
24	Abdul Hadi, S.E	Plt. Kasubid Perencanaan Pendapatan
25	Sukeni	Juru Pungut Retribusi
26	Riki Herkoco, S.STP	Analisis Pendapatan Daerah
27	Bayu Anggoro, S.STP	Analisis Keberatan & Banding
28	Roni Sander Saranga, S.E	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
29	Endang Partiningsih	Administrasi Keuangan
30	Irma Wiraniah, S.E	Bendahara
31	Jarot Triaji, S.E	Analisis Penagihan Pajak
32	Adi Setiawan, S.E	Analisis Rencana Program Kegiatan
33	Ari Usman, S.H	Pengadministrasi Hukum
34	M. Dody Asmara	Pengolah Data & Infomasi Penilaian
35	Eddy Susanto	Pengolah Data Administrasi & Verifikasi
36	Alwin Sidarta	Analisis Pendapatan Daerah
37	Abdul Muis	Operator Mesin
38	Syahroni Effendi	Pengelola Data Administrasi & Verifikasi
39	Irwan Zuhdi	Pengolah Data & Infomasi Penilaian

40	Sukarno	Pengelola Pendaftaran & Pendataan Pajak Retribusi
41	Asbiansyah	Pengadministrasi Penerimaan
42	Heribertus Marcel Ericsson, A.Md.A.Pj.	Penelaah Keberatan
43	Muh. Armin Amin, A.Md.A.Pj.	Pengolah Data & Informasi
44	Vincentius Prawira Sinabutar, A.Md.Pnl.	Pengolah Data & Informasi
45	Rafly Pratama, A.Md.A.Pj.	Pengolah Data & Informasi
46	Herliansyah	Operator Mesin
47	Ramsyah Nuryadi, S.E	Analisis Penagihan Pajak
48	Junaidi, S.E	Analisis Pelayanan
49	Agus Suprianto	Analisis Pelayanan
50	Rahmat Hidayat, S.E	Analisis Penagihan Pajak
51	Nopita Hariani, S.E	Analisis Pelayanan
52	Nurul Diniyah Abidin, S.H	Analisis Pelayanan
53	Henry YP., S.T	Pengolah Data & Informasi Penilaian
54	Erwin Sugianto, S.E	Analisis Pelayanan
55	Hamdan, S.E	Pengelola Data Potensi Pajak
56	Erick Phermana	Pengolah Data
57	Monika Putri, S.E	Analisis Pelayanan
58	Rusmansyah, S.Kom	Pengolah Data & Informasi Penilaian
59	Herdi Mulyanto	Operator Console
60	Fany Septany, S.E	Pengadministrasi Umum
61	Annisia Ariesta Nindyana, S.Pd	Analisis Pelayanan
62	Roberto, S.Kom	Analisis Penagihan Pajak
63	M. Fachri Sanjaya, S.Kom	Pengolah Data
64	Khairun Nisa, S.S	Analisis Penagihan Pajak
65	Syahrum Effendi	Supir
66	Saparuddin	Pramu Kebersihan
67	Rusmayanti	Pramu Kebersihan
68	Andika Saputri	Pramu Kebersihan
69	Arhidayat, S. Kom	Tenaga Ahli (IT)
70	Dr. H. Muhammad Bayu, Drs, MM	Univeristas Muhammadiyah Berau
71	Dr. Sayugo Adi Purwanto, SE, MM	Univeristas Muhammadiyah Berau
72	Dr. Nahwani Fadelan, SE, MM	Univeristas Muhammadiyah Berau
73	Dr. Darmono, SE, M.Si	Univeristas Muhammadiyah Berau
74	Dr. Siti Munawaroh, SE, M.Si	Univeristas Muhammadiyah Berau

Rundown kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rundown Kegiatan

Waktu	Sesi	Kegiatan	Pemateri/PIC
09.00 – 09.30	Pembukaan	Sambutan	H. Irianasyah, SE
09.30 – 09.40		Doa	Ari Usman, SH
09.40 – 10.50	Presentasi	Hasil Pencapaian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024	Dr. H. Djupiansyah Ganie, SE.,M.Si
10.50 – 11.00	Coffee Break		
11.00 – 12.00	Presentasi	Diskusi dan tanya jawab	
12.00 – 14.00	Ishoma		
14.00 – 14.50	Presentasi	Target dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	Dr. H. Djupiansyah Ganie, SE.,M.Si
14.50 – 15.00	Coffe Break		
15.00 – 15.45	Presentasi	Diskusi dan tanya jawab	Dr. H. Djupiansyah Ganie, SE.,M.Si
15.45 – 16.00	Penutupan	Kesimpulan dan rencana tindak lanjut	H. Iriansyah, SE

Setelah pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja bagi pegawai Bapenda Kabupaten Berau, berikut adalah hasil yang dicapai:

1. Tersusunnya Rencana Kerja untuk Setiap Unit Kerja

Setiap unit kerja di Bapenda Kabupaten Berau berhasil menyusun rencana kerja yang lebih terstruktur dan terfokus pada pencapaian target pendapatan daerah. Rencana kerja yang disusun mengacu pada visi, misi, dan strategi Bapenda serta target-target tahunan yang harus dicapai.

2. Peningkatan Pemahaman tentang Perencanaan Kerja

Peserta, yang terdiri dari pegawai dari berbagai tingkat, menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perencanaan kerja. Hal ini tercermin dalam diskusi yang produktif dan feedback positif mengenai materi yang disampaikan. Pegawai lebih memahami bagaimana rencana kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas mereka.

3. Terwujudnya Koordinasi dan Kolaborasi Antara Pegawai

Melalui sesi diskusi dan latihan, terjadi peningkatan koordinasi antarpegawai dalam merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan hasil kerja.

4. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai bagian dari rencana kerja yang lebih terukur, setiap unit kerja juga menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. IKU ini akan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan pencapaian target pendapatan daerah.

5. Peningkatan Kualitas Administrasi Perencanaan

Rencana kerja yang disusun juga mencakup detail administratif yang lebih baik, seperti alokasi sumber daya, timeline pelaksanaan, dan mekanisme pemantauan. Hal ini akan membantu pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara lebih sistematis dan terorganisir.

6. Penerapan Teknologi dalam Penyusunan Rencana Kerja

Sebagai bagian dari upaya modernisasi, penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan rencana kerja mulai diperkenalkan dalam kegiatan ini. Beberapa pegawai sudah mengintegrasikan penggunaan perangkat lunak untuk menyusun dan memonitor perkembangan rencana kerja mereka.

7. Evaluasi dan Umpan Balik dari Peserta

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi evaluasi, di mana peserta memberikan umpan balik mengenai kegiatan ini. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ada pula saran agar sesi pelatihan lebih mendalam, terutama terkait teknik analisis data dalam perencanaan kerja.

8. Tindak Lanjut dan Pemantauan Implementasi

Hasil rencana kerja yang telah disusun akan dipantau secara berkala oleh manajemen Bapenda untuk memastikan bahwa rencana kerja diimplementasikan dengan baik. Kegiatan tindak lanjut ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, kegiatan penyusunan rencana kerja ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pegawai Bapenda Kabupaten Berau kini memiliki alat yang lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan tugas mereka, dengan fokus yang lebih jelas terhadap target pendapatan daerah yang harus dicapai. Selanjutnya, diharapkan agar kegiatan ini dapat terus diikuti dengan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan pencapaian tujuan.

DAFTAR REFERENSI

- Bryson, J. M. (2011). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector: What can be done? *Public Administration and Development*, 15(5), 441–463. <https://doi.org/10.1002/pad.4230150502>
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Gava Media.
- Munawaroh, S., Ganie, D., & Purwanto, S. A. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau). *JEMMA (Jurnal of Economic, Management and Accounting)*, 8(1), 60–69.
- Munawaroh, S., Ratnawati, T., & Pristiana, U. (2024). The effect of information asymmetry, budget emphasis, individual capacity and self-esteem on budget performance with budgetary slack as a mediation variable and budget participation as a moderating variable in regional apparatus organizations in Berau district. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 1082–1095.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>

DOKUMETASI

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3